

PENGARUH *GOOD GOVERNANCE*, *WHISTLEBLOWING SYSTEM*, DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENCEGAHAN *FRAUD* PADA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA: STUDI KASUS KEUANGAN DANA DESA DI ARGOMULYO, KECAMATAN SEDAYU, KABUPATEN BANTUL

THE EFFECT OF GOOD GOVERNANCE, WHISTLEBLOWING SYSTEM, AND INTERNAL CONTROL ON FRAUD PREVENTION IN VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT: CASE STUDY VILLAGE FUND FINANCE IN ARGOMULYO, SEDAYU DISTRICT, BANTUL REGENCY

Chindy Clawdya Br Ginting^{1*}, Hasim As'ari²

Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Indonesia

***Email Correspondence:** Chindyclawdya12@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the influence of Good Governance, the Whistleblowing System, and Internal Control on fraud prevention in village financial management. The research was conducted in Argomulyo Village, Sedayu District, Bantul Regency, using a quantitative approach. Data were collected through questionnaires distributed to 31 village officials directly involved in financial management. The data were analyzed using multiple linear regression with the assistance of SPSS. The results indicate that Good Governance, the Whistleblowing System, and Internal Control have a positive and significant effect on fraud prevention, both partially and simultaneously. These findings demonstrate that the implementation of sound governance practices, an effective reporting system, and strong internal controls can reduce the likelihood of fraudulent activities in village financial management. The application of transparency, accountability, and continuous supervision principles plays an essential role in strengthening integrity and public trust in village administration. Therefore, enhancing Good Governance practices, improving the effectiveness of the Whistleblowing System, and reinforcing Internal Control are strategic measures to prevent fraud and promote accountable and sustainable village financial governance.

Keywords: *Good Governance, Whistleblowing System, Internal Control, Fraud Prevention, Village Finance.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Good Governance*, *Whistleblowing System*, dan Pengendalian Internal terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Studi dilakukan di Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul dengan pendekatan kuantitatif. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang dibagikan kepada 31 perangkat desa yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan desa. Analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Good Governance*, *Whistleblowing System*, dan Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*, baik secara parsial maupun simultan. Temuan ini menegaskan bahwa penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, sistem pelaporan pelanggaran yang efektif, serta mekanisme pengendalian internal yang kuat mampu mengurangi peluang terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa. Implementasi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan berkelanjutan berperan penting dalam memperkuat integritas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa. Oleh karena itu, peningkatan penerapan *Good Governance*, efektivitas *Whistleblowing System*, dan penguatan pengendalian internal menjadi langkah strategis dalam mencegah *fraud* serta menciptakan tata kelola keuangan desa yang akuntabel dan berkelanjutan.

Kata kunci: *Good Governance, Whistleblowing System, Pengendalian Internal, Pencegahan Fraud, Keuangan Desa.*

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan desa merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi lokal. Efektivitas pengelolaan keuangan desa mewujudkan tolok ukur kinerja Pemdes terhadap menunaikan amanah publik serta mewujudkan Good Governance yang akuntabel. Sejak diberlakukannya kebijakan Dana Desa dengan sumber APBN, desa memiliki kewenangan lebih besar terhadap mengelola keuangan secara mandiri. Kemandirian fiskal ini diinginkan bisa menumbuhkan inovasi lokal serta mengefektifkan pemanfaatan dana selaras keperluan kontekstual masyarakat desa. Namun, peningkatan alokasi dana tersebut juga diikuti dengan meningkatnya risiko terjadinya penyimpangan atau fraud dalam pengelolaannya, seperti penyalahgunaan anggaran, laporan fiktif, dan ketidaksesuaian penggunaan dana dengan ketentuan yang berlaku. Risiko tersebut menuntut implementasi mekanisme pengawasan yang kian ketat, termasuk penguatan pengendalian internal serta sistem pelaporan yang transparan, supaya potensi kecurangan bisa diminimalkan.

Berbagai kasus fraud pada pengelolaan dana desa memperlihatkan ada kelemahan pada tata kelola pemerintahan desa, khususnya terkait transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan. Kelemahan ini menandakan mekanisme kontrol internal belum sepenuhnya efektif terhadap meminimalisir penyalahgunaan wewenang serta sumber daya. Kondisi ini dapat berdampak pada terhambatnya pembangunan desa, menurunnya kualitas pelayanan publik, serta berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparatur desa. Dampak tersebut memperlihatkan fraud bukan sekedar merupakan persoalan finansial semata, namun serta masalah strategis yang bisa merusak legitimasi pemerintahan lokal. Maka sebab itu, usaha meminimalisir fraud menjadi aspek yang amat krusial guna memastikan pengelolaan keuangan desa berjalan secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Pendekatan preventif melewati implementasi prinsip good governance, penguatan pengendalian internal, serta mekanisme whistleblowing yang memadai mewujudkan prasyarat guna menegakkan integritas serta keberlanjutan pembangunan desa.

Penerapan prinsip good governance diyakini mampu meminimalkan terjadinya fraud melalui penguatan transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta penegakan aturan yang jelas. Prinsip-prinsip tersebut menciptakan kerangka normatif yang bukan sekedar meregulasi perilaku pegawai desa, namun serta menumbuhkan budaya Good Governance yang berintegritas. Selain itu, keberadaan whistleblowing system berperan selaku mekanisme pelaporan pelanggaran yang memungkinkan aparatur desa ataupun masyarakat guna melaporkan adanya kecurangan dengan aman serta bertanggung jawab. Dengan menyediakan saluran pelaporan yang terlindungi, sistem ini meminimalisir hambatan psikologis serta sosial yang mungkin dialami pelapor terhadap mengungkap penyimpangan. Sistem ini berfungsi sebagai alat deteksi dini terhadap praktik fraud yang berpotensi merugikan keuangan desa. Selain fungsi preventif, sistem whistleblowing juga

punya peran korektif, sebab laporan yang masuk bisa mewujudkan landasan untuk tindakan perbaikan serta penegakan akuntabilitas dengan tepat waktu.

Di sisi lain, sistem pengendalian internal efektif juga mewujudkan aspek kunci pada pencegahan fraud. Pengendalian internal yang kokoh mewujudkan fondasi operasional yang menegaskan kepatuhan pada prosedur serta menekan peluang penyimpangan dengan sistematis. Pengendalian internal baik bisa menutup kesempatan terjadinya kecurangan melalui pemisahan tugas, prosedur yang jelas, pengawasan berkelanjutan, serta evaluasi terhadap setiap aktivitas pengelolaan keuangan desa. Langkah-langkah tersebut bukan sekedar bersifat administratif, namun serta strategis terhadap membangun mekanisme akuntabilitas yang berkesinambungan. Tetapi, temuan studi sebelumnya menunjukkan temuan yang belum teguh mengenai pengaruh good governance, whistleblowing system, serta pengendalian internal pada meminimalisir fraud, sehingga masih ada research gap yang butuh ditelaah kian lanjut. Kesenjangan studi ini membuka peluang guna melaksanakan analisa empiris kian mendalam, terutama dengan pendekatan kuantitatif yang bisa menilai secara simultan interaksi antarvariabel dalam konteks pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan kondisi tersebut, studi ini mempunyai tujuan guna menganalisa pengaruh good governance, whistleblowing system, serta pengendalian internal pada pencegahan fraud pada pengelolaan keuangan desa. Studi ini dirangkai guna menyalurkan pemahaman yang kian mendalam tentang mekanisme pengelolaan keuangan desa yang efektif, serta aspek-aspek yang bisa menghambat atau memperkokoh integritas fiskal. Temuan studi ini diinginkan bisa menyalurkan kontribusi empiris bagi pengembangan literatur akuntansi bidang publik serta menjadi bahan pertimbangan Pemdes terhadap memperkokoh sistem pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, serta bebas dari fraud. Maka sebab itu, temuan studi diinginkan bukan sekedar memperkaya kajian akademis, namun serta punya implikasi praktis nyata untuk penetapan kebijakan serta peningkatan kapasitas Good Governance desa.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Fraud Triangle

Teori Fraud Triangle (Cressey, 1953) menjabarkan “kecurangan (fraud) terjadi karena tiga faktor utama, yaitu tekanan (pressure), kesempatan (opportunity), dan rasionalisasi (rationalization)”. Kerangka ini mewujudkan landasan konseptual yang luas dipakai guna menganalisa penyebab perilaku curang dalam beragam konteks organisasi, melingkupi sektor publik. Tekanan muncul akibat tuntutan ekonomi atau pekerjaan, kesempatan timbul karena lemahnya pengendalian dan pengawasan, sedangkan rasionalisasi merupakan pembenaran pelaku atas tindakan curang. Ketiga elemen tersebut saling berkaitan, sehingga intervensi yang efektif membutuhkan pendekatan simultan guna menekan semua aspek penyebab fraud. Pada pengelolaan keuangan desa, 3 aspek ini bisa diminimalkan melalui tata kelola yang baik, sistem pelaporan yang efektif, dan pengendalian internal yang kuat. Dengan implementasi langkah-langkah tersebut, potensi kecurangan bisa ditekan semenjak

dini, sekaligus menumbuhkan budaya akuntabilitas serta integritas dalam pengelolaan dana desa.

Pencegahan Fraud

Pencegahan fraud ialah usaha sistematis guna mengurangi kemungkinan timbulnya kecurangan melalui kebijakan, prosedur, dan pengawasan yang efektif. Pendekatan sistematis ini menekankan pada pencegahan proaktif daripada penindakan reaktif, sehingga risiko penyimpangan bisa diminimalkan sebelum menciptakan dampak signifikan. Pencegahan fraud lebih efisien dibandingkan penanganan setelah kecurangan terjadi karena mampu menekan potensi kerugian dan meningkatkan kepercayaan publik. Efisiensi tersebut juga tercermin dalam optimalisasi sumber daya organisasi, sebab pengawasan yang tepat bisa meminimalisir terciptanya pemborosan serta penyalahgunaan dana. Dalam konteks keuangan desa, pencegahan fraud diwujudkan melalui transparansi, akuntabilitas, serta keterlibatan masyarakat dalam pengawasan. Partisipasi masyarakat bukan sekedar berfungsi selaku kontrol eksternal, namun serta memperkuat legitimasi serta akseptabilitas kebijakan pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan.

Good Governance

Good governance bisa dimaknai selaku sebuah sistem pengelolaan pemerintahan, berlandaskan keterbukaan informasi, pertanggungjawaban jelas, pelibatan aktif para pemangku kepentingan, serta penegakan prinsip keadilan dalam semua tahapan penetapan putusan. Penerapan good governance pada pengelolaan keuangan desa dapat mempersempit peluang terjadinya fraud dengan meningkatkan keterbukaan informasi dan pengawasan publik. Kian baik penerapan good governance, kian kecil risiko terjadinya fraud.

Whistleblowing System

Whistleblowing system ialah mekanisme pelaporan pelanggaran yang berfungsi sebagai alat deteksi dini terhadap fraud. Mekanisme ini dirangkai selaku kanal institusional yang memungkinkan aliran informasi kritis tersampaikan tanpa mesti melewati jalur birokratis berbelit. Sistem ini mendorong individu untuk melaporkan indikasi kecurangan secara aman dan bertanggung jawab. Aspek keamanan serta tanggung jawab tersebut mewujudkan prasyarat esensial supaya pelaporan tidak menimbulkan risiko personal untuk pelapor ataupun distorsi informasi. Keberadaan whistleblowing system yang efektif dapat menekan rasionalisasi pelaku fraud karena meningkatkan kemungkinan terungkapnya tindakan kecurangan. Maka sebab itu, sistem ini berkontribusi dalam menciptakan persepsi semua penyimpangan punya probabilitas tinggi guna teridentifikasi serta diproses dengan akuntabel.

Pengendalian Internal

Pengendalian internal ialah tahapan yang dirangkai guna menjamin keandalan laporan keuangan, ketaatan pada regulasi, serta efektivitas operasional. Pada pengelolaan keuangan

desa, pengendalian internal berperan menutup peluang terjadinya fraud melalui pemisahan tugas, prosedur yang jelas, dan pengawasan berkelanjutan.

Pengembangan Hipotesis

Penerapan good governance menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan dalam pengelolaan keuangan desa. Prinsip-prinsip tersebut dapat mengurangi peluang terjadinya fraud dengan meningkatkan keterbukaan informasi dan pengawasan publik. Dalam perspektif Fraud Triangle, good governance berperan dalam menekan faktor kesempatan (opportunity) dan tekanan (pressure) yang dapat mendorong aparat desa melakukan kecurangan. Dengan tata kelola yang baik, pengelolaan keuangan desa menjadi lebih terkontrol dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga risiko fraud dapat diminimalkan.

H1: Good governance berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud pada pengelolaan keuangan desa.

Whistleblowing system berperan selaku mekanisme pelaporan pelanggaran yang memungkinkan terdeteksinya indikasi fraud secara dini. Keberadaan sistem ini dapat menekan faktor rasionalisasi (rationalization) dalam Fraud Triangle, karena pelaku menyadari bahwa tindakan kecurangan memiliki risiko tinggi untuk dilaporkan dan diungkap. Sistem pelaporan yang aman dan disertai perlindungan terhadap pelapor mendorong budaya kejujuran dan akuntabilitas dalam organisasi desa.

H2: Whistleblowing system berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud pada pengelolaan keuangan desa.

Pengendalian internal yang efektif mencakup pemisahan tugas, prosedur otorisasi yang jelas, serta pengawasan yang berkelanjutan. Sistem ini berperan langsung dalam menutup peluang (opportunity) terjadinya fraud sebagaimana dijelaskan dalam Fraud Triangle. Pada pengelolaan keuangan desa, pengendalian internal kokoh dapat mencegah penyimpangan melalui mekanisme kontrol dan evaluasi yang sistematis.

H3: Pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud pada pengelolaan keuangan desa.

METODE

Studi ini memakai pendekatan kuantitatif dengan jenis studi asosiatif kausal, mempunyai tujuan guna menganalisa pengaruh good governance, whistleblowing system, serta pengendalian internal pada pencegahan fraud pada pengelolaan keuangan desa. Pendekatan ini diambil sebab menyajikan kerangka analitis terukur serta memungkinkan pengujian korelasi sebab-akibat dengan objektif melewati prosedur statistik. Karakter asosiatif kausal pada studi ini menempatkan variabel-variabel yang dikaji pada relasi empiris yang bisa diuji dengan rasional serta sistematis. Objek studi ialah pengelolaan dana desa, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul. Pemilihan lokasi studi

dilandaskan pertimbangan keselarasan konteks empiris dengan fokus kajian serta ketersediaan data yang menyokong pelaksanaan studi dengan optimal.

Populasi pada studi ini ialah semua pegawai desa yang terlibat pada pengelolaan keuangan desa. Teknik perolehan sampel yang dipakai ialah sampling jenuh, semua anggota populasi diwujudkan sampel studi, dengan jumlah responden sebanyak 31 orang.

Data penelitian berupa data primer yang diperoleh melewati distribusi angket secara langsung pada partisipan. Pemilihan data primer dipandang relevan sebab memungkinkan peneliti mendapat representasi empirik aktual selaras konteks studi yang ditelaah. Alat studi dirangkai berlandaskan indikator variabel serta dinilai memakai skala Likert empat tingkat. Pemakaian skala tersebut dimaksudkan guna menangkap gradasi sikap responden dengan kian terstruktur tanpa menciptakan ambiguitas penilaian. Variabel independen pada studi ini meliputi good governance, whistleblowing system, serta pengendalian internal, sedangkan variabel dependen adalah pencegahan fraud. Konstruksi variabel tersebut dirumuskan dengan konseptual supaya bisa menggambarkan relasi kausal logis serta bisa dipertanggungjawabkan dengan teoretis.

Analisa data dilaksanakan memakai SPSS. Pemanfaatan perangkat lunak ini diambil atas landasan kapabilitasnya terhadap mengelola data kuantitatif dengan sistematis serta meminimalkan potensi kekeliruan komputasional. Tahapan analisa meliputi uji kualitas data (pengujian validitas serta reliabilitas), uji asumsi klasik, serta analisa regresi linier berganda guna menguji pengaruh variabel independen pada variabel dependen. Rangkaian proses tersebut dirangkai dengan berjenjang supaya semua prosedur analitis saling menopang serta menciptakan simpulan yang bertumpu fondasi metodologis kokoh. Uji hipotesis dilaksanakan menggunakan pengujian t guna pengaruh parsial serta pengujian F bagi pengaruh simultan dengan tingkat signifikansi 5%. Penetapan taraf signifikansi tersebut dimaksudkan guna memelihara keseimbangan ketelitian ilmiah serta kelaziman konvensi statistik yang umum dianut pada studi empiris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Tabel 1. Analisis Deskriptif Variabel Good Governance, Whistleblowing system, Pengendalian Internal, Pencegahan Fraud dalam keuangan desa Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std.Deviation
Good Governance	31	22	26	24,3871	0,91933
Whistleblowing System	31	27	29	28,1935	0,83344
Pengendalian Internal	31	39	41	39,8065	0,54279
Pencegahan Fraud	31	52	56	53,9677	1,1397
Valid N (listwise)	31				

Sumber: Data diolah SPSS 27, tahun 2025

Analisis statistik deskriptif pada tabel 4.8 digunakan guna menyajikan penjelasan umum tentang karakteristik data yang menjadi dasar analisa pada studi ini. Subjek penelitian

ialah pegawai desa atau pihak yang terlibat pada pengelolaan keuangan Desa sejumlah 31 pegawai. Data studi terdiri atas tiga variabel independen, yaitu Good Governance (X1), Whistleblowing System (X2), serta Pengendalian Internal (X3), serta satu variabel dependen yakni Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Y). Statistik deskriptif yang dipakai melingkupi nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), standar deviasi, serta jumlah responden (N). Berikut adalah hasil analisis deskriptifnya:

- a) Good Governance (X1) Variabel Good Governance punya nilai minimum 22,00 serta nilai maksimum 26,00, dengan standar deviasi 0,91933 dan nilai rata-rata 24,38. Karena nilai rata-rata > standar deviasi, memperlihatkan bahwa persepsi responden terhadap penerapan prinsip-prinsip Good Governance tergolong baik dan relatif konsisten. Artinya, tata kelola pemerintahan desa dinilai berada pada kategori baik dalam menyokong terbangunnya pengelolaan keuangan desa transparan serta akuntabel.
- b) Whistleblowing System (X2) Variabel Whistleblowing System punya nilai minimum 27,00 serta maksimum 29,00, dengan standar deviasi 0,83344 dan mean 28,19. Rata-rata yang melewati standar deviasi mengindikasikan bahwa mekanisme pelaporan pelanggaran di desa sudah dipahami dan diterapkan dengan cukup baik oleh responden. Hal ini menunjukkan konsistensi persepsi bahwa keberadaan sistem pelaporan dapat berperan penting terhadap meminimalisir timbulnya kecurangan pengelolaan keuangan desa.
- c) Pengendalian Internal (X3) Variabel Pengendalian Internal punya nilai minimum 39,00, nilai maksimum 41,00, standar deviasi 0,54279 dan mean 39,80 Dengan mean > standar deviasi, dapat disimpulkan pengendalian internal yang diterapkan di desa berada pada tingkat yang baik. Artinya, prosedur pengawasan, pemisahan tugas, dan mekanisme kontrol lainnya dinilai cukup efektif dalam mencegah peluang terjadinya fraud.
- d) Pencegahan Fraud Pengelolaan Keuangan Desa (Y) Variabel Pencegahan Fraud punya nilai minimum 52,00 serta maksimum 56,00 dengan standar deviasi 1,1397 serta mean 53,96. Hasil ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan fraud pengelolaan keuangan desa berada pada kondisi yang cukup baik, karena mean > standar deviasi. Menandakan mayoritas responden punya persepsi yang relatif seragam mengenai pentingnya dan keberlangsungan praktik pencegahan fraud di desa.

Hasil Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	r hitung	r tabel (df = 30)	Keterangan
Good Governance (X1)	X1.1	0,702	0,3610	Valid
	X1.2	0,542	0,3610	Valid
	X1.3	0,793	0,3610	Valid
	X1.4	0,524	0,3610	Valid
	X1.5	0,572	0,3610	Valid
	X1.6	0,599	0,3610	Valid

Variabel	Indikator	r hitung	r tabel (df = 30)	Keterangan
Whistleblowing System (X2)	X1.7	0,800	0,3610	Valid
	X2.1	0,675	0,3610	Valid
	X2.2	0,755	0,3610	Valid
	X2.3	0,629	0,3610	Valid
	X2.4	0,689	0,3610	Valid
	X2.5	0,725	0,3610	Valid
	X2.6	0,685	0,3610	Valid
	X2.7	0,727	0,3610	Valid
Pengendalian Internal (X3)	X2.8	0,677	0,3610	Valid
	X3.1	0,390	0,3610	Valid
	X3.2	0,399	0,3610	Valid
	X3.3	0,455	0,3610	Valid
	X3.4	0,453	0,3610	Valid
	X3.5	0,380	0,3610	Valid
	X3.6	0,394	0,3610	Valid
	X3.7	0,524	0,3610	Valid
	X3.8	0,511	0,3610	Valid
	X3.9	0,440	0,3610	Valid
	X3.10	0,441	0,3610	Valid
	X3.11	0,383	0,3610	Valid
X3.12	0,505	0,3610	Valid	
Pencegahan Fraud (Y)	Y1.1	0,495	0,3610	Valid
	Y1.2	0,658	0,3610	Valid
	Y1.3	0,639	0,3610	Valid
	Y1.4	0,640	0,3610	Valid
	Y1.5	0,665	0,3610	Valid
	Y1.6	0,640	0,3610	Valid
	Y1.7	0,604	0,3610	Valid
	Y1.8	0,706	0,3610	Valid
	Y1.9	0,527	0,3610	Valid
	Y1.10	0,611	0,3610	Valid
	Y1.11	0,681	0,3610	Valid
	Y1.12	0,596	0,3610	Valid
	Y1.13	0,743	0,3610	Valid
	Y1.14	0,721	0,3610	Valid
	Y1.15	0,675	0,3610	Valid
	Y1.16	0,549	0,3610	Valid
	Y1.17	0,616	0,3610	Valid

Sumber: Data diolah SPSS 27, tahun 2025

Berlandaskan tabel 4.9, terlihat nilai r hitung pada uji validitas $> r$ tabel dengan $\alpha = 0,05$. Pemakaian $\alpha = 0,05$ diambil selaku ambang signifikansi konvensional yang mencerminkan toleransi kesalahan tipe I 5%, selaras praktik statistik yang lazim pada studi sosial. Dengan jumlah sampel 30, $df = n - 2 = 28$, nilai r tabel 0,3610. Derajat kebebasan ini dipakai guna menyelaraskan distribusi statistik Pearson supaya interpretasi nilai r mewujud tepat juga kontekstual. Karena semua indikator pada studi ini memiliki r hitung yang $> r$ tabel, bisa ditarik simpulan indikator yang dipakai untuk mengukur variabel studi dikatakan valid. Menegaskan semua butir pertanyaan bisa mencerminkan konstruk yang dimaksud dengan konsisten, sehingga data yang terkumpul bisa diwujudkan landasan analisa yang akurat juga kredibel.

Uji Reabilitas

Tabel 3. Hasil Uji Reabilitas

Variabel	Nilai Cronbach's Alpha	Keterangan
Good Governance (X1)	769	Reliabel
Whistleblowing System (X2)	847	Reliabel
Pengendalian Internal (X3)	876	Reliabel
Pencegahan Fraud (Y)	906	Reliabel

Sumber: Data diolah SPSS 27, tahun 2025

Berlandaskan temuan tabel 4.10 bisa teridentifikasi sebuah variabel dinilai reliabel bila cronbach alpha $> 0,60$. Kriteria ini dipakai selaku ambang batas statistik yang lazim diimplementasikan guna menilai konsistensi internal instrumen studi. Memperlihatkan seluruh variabel punya cronbach alpha cukup besar yakni $> 0,60$. Capaian nilai tersebut mengindikasikan butir-butir pernyataan pada semua variabel punya keterkaitan relatif stabil satu sama lain. Bisa ditarik simpulan realibilitas dari variabel Good Governance, Whistleblowing System, Pengendalian Internal, serta Pencegahan Fraud yang diteliti adalah reliabel. Maka sebab itu, instrumen yang dipakai dinilai layak guna menyokong tahapan analisis lanjutan tanpa kekhawatiran inkonsistensi pengukuran.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

Unstandardized Residual	
N	31
Mean	0,000000

Normal Parameters	Std. Deviation	0,80860956
Most Extreme Differences	Absolute	0,119
	Positive	0,119
	Negative	-0,085
Test Statistic		0,119
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,200 ^d

Sumber: Data diolah SPSS 27, tahun 2025

Berlandaskan tabel temuan pengujian Kolmogorov-Smirnov, bisa teridentifikasi nilai Asymp. Sig. (2-tailed) 0,200, bermakna nilai tersebut > batas signifikansi 0,05. Temuan ini menandakan distribusi data residual tidak menyimpang signifikan dari distribusi normal, sehingga memenuhi satu di antara prasyarat fundamental pada analisa regresi. Bisa ditarik simpulan data residual pada studi ini punya distribusi normal. Kondisi normalitas ini krusial sebab menyajikan landasan valid untuk pemakaian pengujian parametrik, melingkupi pengujian t dan F pada analisa regresi linier berganda. Maka sebab itu, proses penelitian dapat dilanjutkan ke tahap pengujian asumsi klasik berikutnya.

Uji Multikolonieritas

Tabel 5. Hasil Uji Multikolonieritas

Modal	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Good Governance (X1)	0,957	1,045
Whistleblowing System (X2)	0,958	1,044
Pengendaalian Internal (X3)	0,998	1,002

Sumber: Data diolah SPSS 27, tahun 2025

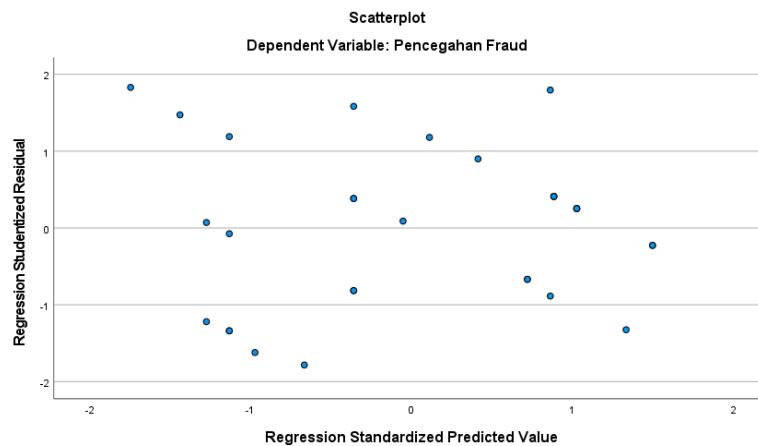
Berlandaskan tabel 4.12 ialah temuan perhitungan dalam pengujian Coefficient didapat sebagai berikut:

- Good Governance (X1) punya nilai tolerance 0,957, berarti > 0,1, serta nilai VIF 1,045, masih ada pada bawah angka 10. Temuan ini menunjukkan variabel tersebut berdiri sendiri serta tidak ada multikolonieritas, model regresi dinilai layak dipakai guna proses uji.
- Whistleblowing System (X2) punya nilai tolerance 0,958, > 0,1, nilai VIF 1,044, yang masih di bawah 10. Dengan demikian, variabel ini juga tidak menunjukkan adanya

multikolinearitas, sehingga model regresi tetap memenuhi syarat untuk digunakan dalam analisis.

- c) Pengendalian Internal (X3) punya nilai tolerance 0,998, > 0,1, nilai VIF 1,002, < 10. Menegaskan variabel modal usaha tidak mengalami multikolinearitas, sehingga model regresi tetap dapat digunakan dalam tahapan pengujian.

Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data diolah SPSS 27, tahun 2025

Berlandaskan scatterplot tersebut, titik-titik tersebar acak serta berada di atas ataupun di bawah 0 dalam sumbu Y. Penyebaran acak ini menandakan varians residual relatif konstan pada semua rentang prediktor, sehingga tidak timbul heteroskedastisitas yang bisa mengganggu keandalan estimasi koefisien regresi. Pola acak ini menunjukkan bahwa model bebas dari heteroskedastisitas. Kondisi ini memperkuat validitas model terhadap merepresentasikan korelasi antarvariabel dengan objektif, sebab fluktuasi error tidak berpola ataupun sistematis. Maka sebab itu, model regresi dianggap memenuhi asumsi serta layak dipakai untuk analisa lanjut. Kelayakan ini mewujudkan prasyarat krusial sebelum dilaksanakannya pengujian hipotesis secara parsial ataupun simultan supaya simpulan yang ditarik bisa dipertanggungjawabkan dengan ilmiah.

Hasil Uji Hipotesis

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Regresi Linier Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficients		Nilai t Hitung	Sig
	B	Std.Error		
(Constant)	38,184	3,568	10,702	0,001
Good Governance (X1)	,239	,053	4,509	0,001
Whistleblowing System (X2)	,870	,059	14,872	0,001
Pengendalian Internal (X3)	-,366	,076	-4,846	0,001

Sumber: Data diolah SPSS 27, tahun 2025

Berlandaskan temuan pengolahan data, maka persamaan regresi yang dipakai studi ini disesuaikan, ialah:

$$Y = a + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + et$$

Good Governance (X1)

Temuan pengujian t memperlihatkan nilai t-hitung 4,509 signifikansi $0,001 < 0,05$, yang bermakna good governance memberi pengaruh nyata pada pencegahan fraud. Penerapan tata kelola yang baik mampu meningkatkan efektivitas desa dalam meminimalkan potensi kecurangan dalam pengelolaan keuangan.

Whistleblowing System (X2)

Variabel whistleblowing system punya nilai t-hitung 14,872 signifikansi $0,001 < 0,05$, yang memperlihatkan pengaruh nyata pada pencegahan fraud. Sistem pelaporan pelanggaran yang efektif memperkuat deteksi dini dan pencegahan tindakan kecurangan.

Pengendalian Internal (X3)

Pengendalian internal memperoleh nilai t-hitung 4,846 signifikansi $0,001 < 0,05$, yang mengindikasikan pengaruh nyata pada pencegahan fraud. Sistem pengendalian yang kuat berfungsi krusial terhadap meningkatkan pengawasan dan menekan potensi terjadinya fraud.

Pengaruh Good Governance Terhadap Pencegahan Fraud

Temuan penelitian memperlihatkan good governance memberi pengaruh nyata dan positif pada pencegahan fraud pengelolaan keuangan desa. Kian baik penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, semakin efektif upaya pencegahan kecurangan. Responden menilai bahwa evaluasi dan penyesuaian keputusan keuangan merupakan bentuk nyata akuntabilitas yang mampu menjaga integritas pengelolaan dana desa. Temuan ini selaras studi terdahulu, menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik berperan penting dalam meminimalkan peluang terjadinya fraud.

Pengaruh Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud

Whistleblowing system terbukti memberi pengaruh nyata pada pencegahan fraud, meskipun efektivitasnya sangat bergantung pada implementasi dan tindak lanjut laporan. Kemudahan mekanisme pelaporan mendorong kesediaan aparatur desa untuk melaporkan indikasi pelanggaran. Namun, tanpa dukungan budaya organisasi, perlindungan pelapor, dan komitmen penanganan laporan, sistem ini belum sepenuhnya optimal dalam memperkuat pencegahan fraud. Hasil ini mendukung studi terdahulu, menyatakan bahwa whistleblowing system efektif apabila diiringi dengan komitmen organisasi yang kuat.

Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud

Pengendalian internal memberi pengaruh signifikan serta positif pada pencegahan fraud. Aparatur desa menilai bahwa pemisahan fungsi, prosedur pemeriksaan, serta

mekanisme pengawasan yang jelas mampu menekan peluang terjadinya penyimpangan keuangan. Pengendalian internal yang kuat memberikan keyakinan bahwa kegiatan pengelolaan keuangan berjalan sesuai ketentuan dan meminimalkan risiko manipulasi. Temuan ini selaras studi terdahulu, menegaskan peran penting pengendalian internal dalam meningkatkan akuntabilitas dan mencegah fraud.

PENUTUP

Kesimpulan

Temuan studi memperlihatkan Good Governance, Whistleblowing System, juga Pengendalian Internal memberi pengaruh positif nyata pada pencegahan fraud pengelolaan keuangan desa. Temuan ini mengindikasikan Good Governance serta mekanisme pengawasan punya peranan determinan terhadap menciptakan perilaku pengelolaan keuangan berintegritas. Implementasi Good Governance menaikkan transparansi, akuntabilitas, juga partisipasi sehingga mampu menekan potensi kecurangan. Prinsip-prinsip tersebut berfungsi selaku rambu normatif yang mengarahkan praktik pengelolaan keuangan supaya selaras kepentingan publik. Keberadaan whistleblowing system yang efektif berperan sebagai mekanisme pengawasan tambahan yang mendorong deteksi dini penyimpangan. Instrumen ini menyediakan kanal pelaporan yang memperkuat fungsi kontrol tanpa sepenuhnya bergantung pada struktur pengawasan formal. Selain itu, pengendalian internal yang kuat melalui pemisahan tugas, prosedur pemeriksaan, dan dokumentasi yang jelas terbukti mampu memperkecil peluang terjadinya fraud. Keberterimaan temuan ini menegaskan pengendalian internal bukan sekedar perangkat administratif, namun serta fondasi operasional terhadap memelihara kredibilitas pengelolaan keuangan desa.

Saran

Pemerintah desa disarankan untuk terus memperkuat penerapan good governance melalui keterbukaan informasi dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan. Upaya tersebut dipandang strategis sebab bisa menumbuhkan kepercayaan publik sekaligus menciptakan iklim tata kelola yang responsif pada kepentingan bersama. Optimalisasi whistleblowing system perlu didukung dengan kemudahan akses, sosialisasi yang memadai, serta perlindungan bagi pelapor. Keberadaan sistem ini seyogianya diposisikan selaku instrumen preventif yang bukan sekedar bersifat reaktif, namun serta edukatif terhadap membangun budaya antikecurangan. Selain itu, penguatan pengendalian internal harus dilakukan secara konsisten melalui pemisahan fungsi, audit internal berkala, dan kerja sama dengan lembaga pengawasan guna memastikan pengelolaan keuangan desa berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari fraud. Konsistensi dalam implementasi pengendalian internal tersebut diinginkan bisa mempersempit ruang timbulnya penyimpangan serta memperkuat integritas pegawai desa secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia Destiyana, Fitri Sabiyla Yassarah, and Nera Marinda Machdar. 2024. "Pengaruh Good Corporate Governance, Pengendalian Internal, Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud." *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen* 3(3):27–39. doi: 10.30640/inisiatif.v3i3.2528.
- Anesya Freni Livia, Nursalma Nursalma, and Meita Sekar Sari. 2024. "Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Good Government Governance Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa." *Akuntansi* 45 5(1):44–55. doi: 10.30640/akuntansi45.v5i1.2418.
- Anon. 2025. "22.0102.0046_Cover_Bab I_Bab Ii_Bab Iii_Bab V_Daftar Pustaka (1)."
- Armelia, Putu Ayu, and Made Arie Wahyuni. 2020. "Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Efektivitas Pengendalian Internal, Dan Moral Sesityy Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa." *Vokasi : Jurnal Riset Akuntansi* 9(2):61. doi: 10.23887/vjra.v9i2.26125.
- Effect, Bystander. 2023. "Whistleblowing System, Bystander Effect,." 5(4):1588–98.
- Fathia, Jihan, and Mirna Indriani. 2022. "Pengaruh Sistem Keuangan Desa Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Pengelolaan Dana Desa Dengan Moralita Individu Sebagai Pemoderasi (Studi Di Desa Kabupaten/Kota Provinsi Aceh)." *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance* 4:455–68. doi: 10.20885/ncaf.vol4.art57.
- Garcia, Ana Rita, Sara Brito Filipe, Cristina Fernandes, Cristina Estevão, and George Ramos. n.d. "Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Moralitas Aparatur, Kompetensi Aparatur, Whistleblowing, Dan Good Governance Terhadap Pencegahan Kecurangan Dana Desa." 128–33.
- Ghozali. 2022. "Aplikasi Analisis Multivariate Lanjutan Dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro." *Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside* 2(3):301–16.
- Ghozali, I. 2022. "Aplikasi Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21." *Badan Penerbit Universitas Diponegoro* (7 ed.).
- Idris, K. ., & Rattanapun, S. . (2024). Characteristics And Competencies Of Dprd Members To Support Good Governance In The Region. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 4(1), 7–14. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v4i1.2495>
- Julio Noya, Revi Wilhelmina Silooy, and Franco Benony Limba. 2023. "Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Dana Desa Dengan Moralitas Sebagai Variabel Moderasi." *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen* 2(4):278–92. doi: 10.30640/inisiatif.v2i4.1436.
- Kagias, Paschalis, Anastasia Cheliatsidou, Alexandros Garefalakis, Jamel Azibi, and Nikolaos Sariannidis. 2022. "The Fraud Triangle – an Alternative Approach." *Journal of Financial Crime* 29(3):908–24. doi: 10.1108/JFC-07-2021-0159.

- Khoerunnisa, Lutfia, Nugraha, and Fitriina Kurniati. 2023. "Pengaruh Whistleblowing Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Pada Pengelolaan Dana Desa." *Journal of Finance, Entrepreneurship* 2(2):143–54.
- Khoiriyah, Andri Shofiana. 2022. "Pengaruh Kompetensi Aparatur, Whistleblowing, Sistem Pengendalian Internal, Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Fraud Dana Desa." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53(9):1689–99.
- Kivaayatul Akhyaar, Anissa Hakim Purwantini, Naufal Afif, and Wahyu Anggit Prasetya. 2022. "Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa." *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi* 13(2):202–17. doi: 10.22225/kr.13.2.2022.202-217.
- NasrullahDali. 2025. "PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP Universitas Halu Oleo." 10(01):142–53.
- Nurjanah, Ike Abdi, and Mia Angelina Setiawan. 2022. "Pengaruh Pengendalian Internal, Moralitas Individu Dan Budaya Organisasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pemerintah Desa." *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 3(3):517–28. doi: 10.24036/jea.v3i3.396.
- Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, Iryanto Irvan Jaya. 2024. "No Title 濟無No Title No Title No Title." 2(02):306–12.
- Septian. 2024. *View_of_Implementasi_Good_Government_Sebagai_Upaya_Pencegahan_Fraud_Dalam_Pengelolaan_Keuangan_Desa[1].Pdf.* 2024.
- Stephanie, Putri, Cecilia Almeida Basri, and Agrade Magaretha. 2024. "Pengaruh Good Corporate Governance Dan Whistleblowing System Terhadap Kecurangan Di Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI Periode 2021-2023." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2(9):281–89.
- Suasri, Eni, Bella Puspita Rininda, Noor Amelia, Alya Lestari, Desy Amelia, and Vivy Andria Utami. 2025. "Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Dengan Moralitas Individu Sebagai Variabel Moderasi." *Monex: Journal of Accounting Research* 14(1):21–35. doi: 10.30591/monex.v14i1.7805.
- Suci Rahmadani, and Sugiarto. 2023. "Pengaruh Pengendalian Internal Dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa." *E-Logis : Jurnal Ekonomi Logistik* 5(1):47–64. doi: 10.70375/e-logis.v5i1.5.
- Wahyuni, Sri, and Nur Hayati. 2022. "Analisis Good Corporate Governance, Pengendalian Internal, Dan Whistleblowing System Dan Fraud." *Journal of Business and Banking* 12(1):125. doi: 10.14414/jbb.v12i1.3260.
- Yasin, Verdi, Muhammad Zarlis, and Mahyuddin K. M. Nasution. 2023. "Filsafat Logika Dan Ontologi Ilmu Komputer." *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research* 2(2):68–75.

Yulistia M, Resti, Arie Frinola Minovia, Neva Novianti, and Karina Rasaki. 2022.
“Profesionalisme, Sensitivitas Etika, Personal Cost Dan Intensi Melakukan
Whistleblowing.” *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika* 12(1):1–11. doi:
10.37859/jae.v12i1.3550.